



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Jalan Cimuncang No. 21D, Padasuka, Kecamatan Cibeunying Kidul
Kota Bandung, Jawa Barat 40125, www.pt-bandung.go.id, info @pt-bandung.go.id

Nomor : 4150/W11-U/RA1.1/VII/2024

Bandung, 04 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN NEGERI MAJALENGKA

di-Majalengka

Dalam rangka pelaksanaan peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

- Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Majalengka dimaksud untuk;
 - Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
- Evaluasi dilaksanakan terhadap 4(empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
- Pengadilan Negeri Majalengka memperoleh nilai sebesar **76,4** atau **(BB) (Sangat Baik)**.
- Nilai Tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun Sebelumnya	2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	21,6	23,4
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	22,5	22,5
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	10,8	10,95
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20	19,5
Nilai Akuntabilitas Kinerja			74,90	76,4
			(BB) (Sangat Baik)	(BB) (Sangat Baik)



NO	CATATAN
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Belum melengkapi dokumen : 1. Juknis Anggaran Kinerja Daerah 2. TUSI, IKU,PK berjenjang,RenAksi Kinerja berkala,PCK Bulanan sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja;
2.	Belum melengkapi matriks pendanaan pada renstra 2020-2024 di dokumen perencanaan kinerja;
3.	Belum melengkapi Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Seluruh Pegawai pada eviden yang dibutuhkan;
4.	Belum terdapat dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala (undangan,notulensi daftar hadir dan foto kegiatan ;
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Belum melengkapi dokumen Petunjuk Teknis Pedoman Pengukuran kinerja , SK Mekanisme Pengumpulan Kinerja, SOP Pengumpulan data Kinerja, jadwal Monev Pengukuran Kinerja;
2.	Belum melengkapi dengan Data E Monev Bappenas, data SIPP dan MIS dan capaian kinerja dari aplikasi Komdanas;
3.	Belum melengkapi Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai dan Rekap Pengajuan Tukin 3 bulan terakhir dan Belum melengkapi dokumen Baperjakat sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
4.	Belum melengkapi dokumen rapat evaluasi capaian kinerja dengan dengan notulensi,daftar hadir dan dokumentasi kegiatan rapat evaluasi kinerja dan reuiu SOP;
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Belum menampilkan bukti penyampaian dokumen laporan kinerja ke Bawas dan BUA;
2.	Belum mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja di website unit kerja disertai tanggal upload dokumennya;
3.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai kinerja;
4.	Dokumen Laporan Kinerja belum menginfokan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan , target jangka menengah dan perbandingan dengan tahun sebelumnya;
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Belum menampilkan dokumen SK Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Sertifikat Diklat SAKIP sebagai indikator bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman dan SDM yang yang memadai;
2.	Belum memuat informasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).
3.	Belum menampilkan dokumen laporan tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas tahun 2022;

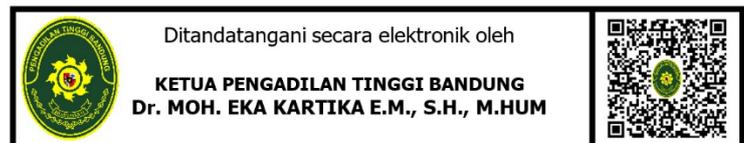


NO	REKOMENDASI
A.	Perencanaan Kinerja
1.	Agar melengkapi dokumen : 1. Juknis Anggaran Kinerja Daerah 2. TUSI, IKU,PK berjenjang,RenAksi Kinerja berkala,PCK Bulanan sebagai pedoman teknis perencanaan kinerja;
2.	Dokumen perencanaan kinerja harus diformalkan , dokumen RKT ditandatangani KPT dan dipublikasikan dokumen perencanaan kinerja ke Web Satker beserta tanggal upload dokumen;
3.	Agar memuat analisis perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang / dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (<i>crosscutting</i>);
4.	Agar membuat dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja secara berkala (undangan,notulensi daftar hadir dan foto kegiatan);
B.	Pengukuran Kinerja
1.	Satker melengkapi dokumen Petunjuk Teknis Pedoman Pengukuran kinerja,, SK Mekanisme Pengumpulan Kinerja, SOP Pengumpulan data Kinerja, jadwal Monev Pengukuran Kinerja;
2.	Melengkapi hasil pengukuran kinerja dengan data dari E Monev Bappenas, data SIPP, MIS dan capaian kinerja dari aplikasi Komdanas;
3.	Agar melengkapi Dokumen Penilaian Kinerja Pegawai dan Rekap Pengajuan Tukin 3 bulan terakhir dilengkapi dokumen baperjakat sebagai dasar dalam penempatan/penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional;
4.	Melengkapi dokumen rapat evaluasi capaian kinerja dengan notulensi,daftar hadir dan dokumentasi kegiatan rapat evaluasi kinerja dan reuiu SOP;
C.	Pelaporan Kinerja
1.	Segera menampilkan bukti penyampaian pengiriman dokumen laporan kinerja ke Bawas dan BUA;
2.	Agar mempublikasikan Dokumen Laporan Kinerja di website unit kerja disertai tanggal upload dokumennya;
3.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dan anggaran dalam mencapai kinerja;
4.	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan , target jangka menengah dan perbandingan dengan tahun sebelumnya;
D.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
1.	Menampilkan dokumen SK Tim Evaluasi Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah dan Sertifikat Diklat SAKIP sebagai indikator bahwa Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman dan SDM yang yang memadai;
2.	Memuat informasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
3.	Agar menampilkan dokumen laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi akuntabilitas Tahun 2022;



Demikian hasil evaluasi Pengadilan Negeri Majalengka Tahun 2023, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di Pengadilan Negeri Majalengka, adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Majalengka segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Ketua Pengadilan Tinggi, terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebaik-baiknya.



Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta.
2. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I di Jakarta.

